

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi pada masa globalisasi dan upaya pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bisnis telah mendorong perluasan peran sektor swasta di bidang jasa dan perdagangan. Era otonomi telah membawa perubahan yang meningkatkan kesejahteraan daerah, termasuk desa-desa. (Trisnawati, 2021).

Desa menjadi salah satu penyelenggara pembangunan dan meningkatkan segala potensi yang ada di desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dalam hal ini negara melindungi dan memberdayakan desa menjadi maju dan demokratis (Diatmika & Rahayu, 2020) (Purnamawati, et al., 2023). Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mengacu pada peraturan tersebut, maka disarankan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tingkat desa.

BUMDes adalah asosiasi moneter yang didirikan sebagai kekuatan keuangan di daerah pedesaan. BUMDes dapat dianggap sebagai instrumen kemandirian desa, dan itu berarti menumbuhkan kemampuan desa dengan diberi dukungan oleh pemerintah desa yang ditunjukkan oleh kapasitasnya. Sementara itu,

sebagai instrumen kesejahteraan dengan mengikutsertakan daerah setempat dalam mengawasi BUMDes dan sebagai inisiatif yang didukung oleh program pemerintah yang dibingkai untuk memperbaiki taraf hidup daerah setempat. BUMDes adalah jenis badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. BUMDes merupakan investasi langsung yang didasarkan pada potensi dan kekayaan desa. (Wijaya, 2021).

BUMDes telah berkembang dengan cepat di Indonesia, disadari bahwa jumlah BUMDes telah berkembang dari tahun ke tahun. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), terdapat 53.005 BUMDes secara luas. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya di Provinsi Bali, secara konsisten terus bertambah. Diketahui bahwa dari 636 desa di Bali, terdapat 627 BUMDes. Keberadaan BUMDes di Wilayah Bali tersebar di 8 kabupaten dan 1 kabupaten seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1.  
Data Jumlah Bumdes di Provinsi Bali Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Total Desa	Total BUMDes (Unit)
1.	Jembrana	41	41
2.	Tabanan	133	133
3.	Badung	46	46
4.	Denpasar	27	27
5.	Klungkung	53	51
6.	Bangli	68	68
7.	Karangasem	75	74
8.	Buleleng	129	123

No.	Kabupaten/Kota	Total Desa	Total BUMDes (Unit)
9.	Gianyar	64	64
Total		636	627

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), 2023.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa di Provinsi Bali hampir seluruh desa memiliki BUMDes yang tersebar. Kabupaten Tabanan menduduki peringkat pertama dengan jumlah unit BUMDes sebanyak 133 unit, disusul Kabupaten Buleleng 123 unit, kabupaten Karangasem 74 unit, Kabupaten Bangli 68 unit, Kabupaten Gianyar 64 unit, Kabupaten Klungkung 51 unit, Kabupaten Badung 46 unit, Kabupaten Jembrana 41 unit, dan Kota Denpasar 27 unit, serta masih ada sebanyak 9 desa yang belum membentuk BUMDes.

BUMDes didirikan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memberdayakan ekonomi tingkat desa baik itu pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di daerah tersebut (Purnamawati, 2018). Sebagai bentuk pengembangan lanjut dari BUMDes yang lebih menekankan pada aspek kemandirian dan keberlanjutan disebut BUMDesma. Pendirian BUMDesma didorong oleh keinginan untuk membuat BUMDes lebih mandiri dalam hal finansial dan operasional. Dalam perputaran keuangan lokal, tugas BUMDesma berubah menjadi semakin penting untuk mengerjakan bantuan pemerintah jaringan desa. BUMDesma harus memiliki dua poin penting, yaitu profit dan benefit, karena merupakan badan usaha yang dimiliki oleh kelompok-kelompok desa dan memiliki tanggung jawab untuk

menggerakkan ekonomi lokal dengan mengembangkan potensi bersama yang dimiliki desa agar lebih berkembang. (Faisol & Firdaus, 2021).

Diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang difasilitasi oleh BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) untuk pendirian BUMDesma, BUMDesma juga merupakan bentuk perubahan dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan atau BUMDesma non-konvensional. Dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) tentang pengalihan sumber daya yang akan dijadikan bahasan dalam pendirian BUMDesma melalui Peraturan Bersama Kepala Desa dan disesuaikan dengan pedoman yang relevan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi landasan hukum pendirian BUMDesma. (Faisol&Firdaus, 2021).

Berdasarkan data dari Provinsi Bali diketahui bahwa hanya sedikit BUMDesma yang telah dibentuk, baik yang konvensional maupun non konvensional (Kemendesra, 2023). Adapun jumlah BUMDesma di Provinsi Bali yaitu sebanyak 85 dari 8 Kabupaten dan 1 Kota Madya. Kabupaten Buleleng merupakan daerah yang paling banyak memiliki BUMDesma yaitu sebanyak 14 Unit yang berdiri dan beroperasi, ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.  
Data Penyebaran BUMDesma di Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No.	Nama BUMDesma	Lokasi
1.	BUM Desa Bersama BUM Desa Bhuana Utama	Sukasada, Panji.
2.	BUM Desa Bersama BUM Desa Sari Artha	Busung Biu, Sepang Kelod.

No.	Nama BUMDesma	Lokasi
3.	BUM Desa Bersama Giri Sedana Gunung Sari	Seririt, Gunung Sari.
4.	BUM Desa Bersama Rina Dana	Busung Biu, Pucak Sari.
5.	BUM Desa Bersama Bali Aga	Banjar, Cempaga.
6.	BUM Desa Bersama Nitya Artha LKD	Gerokgak, Gerokgak.
7.	BUM Desa Bersama Kerta Partha	Sukasada, Panji.
8.	BUM Desa Bersama Sawan Sejahtera LKD	Sawan, Kerobokan
9.	BUM Desa Bersama Merta Harta Lestari LKD	Tejakula, Tejakula.
10.	BUM Desa Bersama Artha Windu Sari LKD	Banjar, Dencarik.
11.	BUM Desa Bersama Tirta Amerta Sejahtera Kubutambahan LKD	Kubutambahan, Kubutambahan.
12.	BUM Desa Bersama Sasana Artha LKD	Busung Biu, Busung Biu.
13.	BUM Desa Bersama Setya Dharma Shanti LKD	Buleleng, Baktiseraga.
14.	BUM Desa Bersama Artha Wiguna LKD	Seririt, Tangguwisia.

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), 2023.

Salah satu BUMDesma yang terletak di Kabupaten Buleleng dan pertama kali dibentuk yaitu BUMDesma Tirta Amerta Sejahtera Kubutambahan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 3 Mei 2018 terbentuk dari kesepakatan antar desa yang berjumlah 13 Desa di Kecamatan Kubutambahan (Koran Buleleng, 2018). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Direktur BUMDesma yaitu Ketut Parca pada 18 Maret 2024, Adapun unit usaha yang baru

dijalankan yaitu simpan pinjam. Adapun permasalahan yang diperoleh yaitu belum maksimal dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki dan penerimaan yang diterima kurang maksimal, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan (Septianingsih, et al., 2017). Pada saat pandemi Covid-19, pemerintah mengatur kebijakan terkait pembatasan sosial mengakibatkan predaran ekonomi melambat. Hal ini berdampak pada Sebagian besar kegiatan operasional perusahaan dihentikan sementara (Purnamawati, 2020).

Peneliti terdahulu mengenai analisis rasio keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan dilakukan oleh Dewi dan Ratih (2023) pada BUMDesa Dharma Karya menemukan bahwa rata-rata rasio keseluruhan mengalami fluktuasi dengan kriteria baik. Selanjutnya, penelitian yang dikaji oleh (Lestari, et al., 2022) menemukan bahwa proporsi likuiditas dan proporsi solvabilitas meningkat dengan ukuran yang sangat baik, namun proporsi profitabilitas dan proporsi aktivitas berfluktuasi. Karena beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan belum konsisten, peneliti tertarik untuk mempelajari bagaimana kinerja keuangan pada badan usaha di Desa Kubutambahan.

BUMDesma sebagai bentuk penggabungan badan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan prekonomian desa memerlukan pengelolaan yang baik agar dapat menciptakan kinerja keuangan yang tepat sehingga dapat bersaing dan menjalankan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab. Keberhasilan dalam mencapai tujuan badan usaha merupakan prestasi manajemen. Penilaian kinerja keuangan dilakukan oleh pihak manajemen agar memperoleh tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Fahmi (2018), kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan keuangan secara baik dan

benar. Kinerja keuangan sangat bermanfaat untuk mengetahui perkembangan suatu badan usaha yang sedang beroperasi, serta pemerintah juga dapat mengukur kualitas layanan yang diberikan oleh BUMDesma berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan yang dilakukan. Analisis kinerja keuangan pada badan usaha dapat dilaksanakan dengan menggunakan alat untuk menganalisis kinerja keuangan, yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan (Purnamawati, 2020). Analisis rasio keuangan yang digunakan yaitu 1). Entitas menggunakan analisis rasio likuiditas untuk menilai kemampuannya dalam menggunakan aset lancar yang tersedia untuk melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo. 2). Entitas menggunakan analisis rasio solvabilitas untuk menentukan seberapa besar dana yang digunakan untuk utang atau pinjaman. 3). Entitas menggunakan analisis yang disebut rasio aktivitas untuk menggambarkan sejauh mana entitas menggunakan sumber dayanya. 4). Analisis yang digunakan untuk menghitung keuntungan dari penggunaan modal adalah rasio profitabilitas.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) TIRTA AMERTA SEJAHTERA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Belum pernah adanya penilaian kinerja terhadap laporan keuangan di BUMDesma yang mengakibatkan beberapa hal, seperti kurangnya dalam memanfaatkan sumber daya atau aset perusahaan yang tersedia.
2. Adanya pandemi Covid-19 yang memberikan dampak buruk terhadap prekonomian sehingga menjadi tantangan berat khususnya terhadap perusahaan.
3. Hasil penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan pada badan usaha dengan hasil penelitian tidak stabil/fluktuatif.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis memberikan fokus penelitian pada analisis kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan pada BUMDesma Tirta Amerta Sejahtera, Kecamatan Kubutambahan Tahun 2021-2023.

### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah, sehingga terdapat rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan pada BUMDesma Tirta Amerta Sejahtera, Kecamatan Kubutambahan Tahun 2021-2023 dilihat dari analisis rasio likuiditas?
2. Bagaimana kinerja keuangan pada BUMDesma Tirta Amerta Sejahtera, Kecamatan Kubutambahan Tahun 2021-2023 dilihat dari analisis rasio solvabilitas?

3. Bagaimana kinerja keuangan pada BUMDesma Tirta Amerta Sejahtera, Kecamatan Kubutambahan Tahun 2021-2023 dilihat dari analisis rasio aktivitas?
4. Bagaimana kinerja keuangan pada BUMDesma Tirta Amerta Sejahtera, Kecamatan Kubutambahan Tahun 2021-2023 dilihat dari analisis rasio profitabilitas?

### **1.5 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka diperoleh beberapa tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada BUMDesma Tirta Amerta Sejahtera, Kecamatan Kubutambahan Tahun 2021-2023 dilihat dari analisis rasio likuiditas.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada BUMDesma Tirta Amerta Sejahtera, Kecamatan Kubutambahan Tahun 2021-2023 dilihat dari analisis rasio solvabilitas.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada BUMDesma Tirta Amerta Sejahtera, Kecamatan Kubutambahan Tahun 2021-2023 dilihat dari analisis rasio aktivitas.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada BUMDesma Tirta Amerta Sejahtera, Kecamatan Kubutambahan Tahun 2021-2023 dilihat dari analisis rasio profitabilitas.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini semoga bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil berikut dari penelitian ini diharapkan:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan tambahan ilmu pengetahuan mengenai kinerja keuangan badan usaha desa, dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini difungsikan sebagai wadah untuk mengembangkan dan menambah referensi mengenai analisis kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan.

#### b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dihasilkan dapat membantu organisasi dalam mengelola aset dan dananya lebih efektif dan teralokasi serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

#### c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Bagi Universitas, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan potensinya dalam pengembangan teori akuntansi serta bisa ditujukan sebagai referensi penelitian selanjutnya.